



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2024-2025**

SELASA, 27 MEI 2025

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swasti Astu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Yang kami hormati:

- **Para Wakil Ketua DPR RI;**
- **Para Anggota DPR RI;**
- **Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada saat ini, kita dihadapkan pada tantangan perekonomian global yang sedang bergejolak, perang tarif perdagangan; konflik geopolitik yang masih tinggi; dan dinamika global lainnya, yang ikut berdampak pada kondisi dalam negeri baik secara ekonomi, politik sosial, dan budaya;

Merespon hal-hal tersebut maka dibutuhkan Kebijakan Negara yang tepat dalam mengintervensi situasi sehingga dapat menjaga keberlanjutan perekonomian nasional, memastikan pembangunan nasional tetap berjalan dan melindungi kehidupan rakyat.

Kita pahami bersama, bahwa kita memiliki sejumlah tantangan dalam pembangunan nasional; Semua inisiatif

dalam menyelesaikan tantangan pembangunan nasional, pada akhirnya dibatasi oleh kemampuan keuangan negara; oleh karena itu diperlukan program prioritas dan kerja-kerja yang terencana, terukur, dan terkoordinasi.

DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya, akan ikut memperkuat kebijakan-kebijakan negara yang diperlukan bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Negara untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.

DPR RI, dalam fungsi legislasi, akan terus melanjutkan pembahasan terhadap 8 (delapan) Rancangan Undang Undang yang saat ini masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.

Dalam membentuk Undang Undang, DPR RI dan Pemerintah berkomitmen untuk terus mengedepankan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Komitmen ini diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk mendapatkan penjelasan (*right to be explained*), dan hak

untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*) dalam proses pembentukan undang-undang.

Meaningful Participation merupakan sarana komunikasi antara pembentuk Undang Undang dan rakyat, sehingga Undang Undang yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat.

Sidang Dewan yang Terhormat,

DPR RI melalui fungsi anggaran telah mengawal pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 serta mencermati pembahasan awal arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2026.

Realisasi anggaran Triwulan pertama Tahun 2025 masih menunjukkan konsolidasi fiskal di internal Pemerintah; Pelaksanaan efisiensi APBN 2025 agar disertai dengan kinerja yang baik dan transparansi pengelolaannya. Setiap Rupiah yang digunakan dalam APBN atau yang dihemat adalah uang rakyat yang dititip kelolakan untuk membangun kehidupan rakyat yang sejahtera.

Pemerintah telah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 dengan tema “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi”. Tema ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi struktural yang substansial sehingga Indonesia memiliki kemampuan dan kekuatan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan kekuatan ekonomi nasional.

Tema tersebut juga sangat relevan dengan tatanan global yang semakin kompleks dan tidak pasti. Dinamika global saat ini semakin menuntut kita untuk tidak dapat bergantung sepenuhnya pada mekanisme pasar global. Kita harus membangun kekuatan dalam negeri.

DPR RI akan terus mencermati agar APBN Tahun Anggaran 2026 dirancang adaptif dan tangguh dalam menghadapi tekanan global sekaligus mampu menjawab kebutuhan rakyat dalam pembangunan nasional.

Pada sidang paripurna hari ini, DPR RI telah menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024. Untuk itu, pada masa persidangan selanjutnya Alat Kelengkapan Dewan dapat segera menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut.

Sidang Dewan yang Terhormat,

DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui berbagai rapat yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat, antara lain:

1. insiden pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut;
2. percepatan pengangkatan PPPK tahun 2025;
3. lonjakan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk di industri media dan televisi;
4. berbagai kebijakan untuk mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan nasional;
5. pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap kinerja ekonomi nasional;
6. pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

7. membenah tata kelola sektor migas dan hilirisasi berbagai komoditas pertambangan;
8. rencana pengadaan vaksin TBC M72;
9. temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang kasus keracunan pangan di 10 provinsi;
10. rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah;
11. dampak media sosial terhadap perilaku anak; dan
12. penegakan hukum dan rehabilitasi terhadap perkara narkoba.

Pada masa persidangan ini, DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 4 (empat) orang atlet sepakbola.

Selain itu, DPR RI juga telah membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2025, Tim Pengawas terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Tim Pengawas terhadap Penanggulangan Bencana.

Pemerintah harus dapat merespon dengan efektif setiap permasalahan yang dihadapi rakyat; sehingga rakyat merasakan kehadiran negara dalam kehidupannya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada tanggal 12 sampai dengan 15 Mei 2025 DPR RI telah sukses menyelenggarakan Konferensi ke-19 Parlemen Negara OKI (the 19th Session of the PUIC Conference) di Gedung Parlemen DPR RI.

Sebagai tuan rumah, Ketua DPR RI telah menerima tugas sebagai Presiden PUIC sampai dengan diselenggarakannya konferensi PUIC ke 20 di Azerbaijan.

Selain pada kegiatan multilateral, parlemen Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral melalui kunjungan delegasi dari negara-negara seperti Kazakhstan, Jepang, Kamboja dan Republik Rakyat Tiongkok.

Kegiatan pertemuan dengan para duta besar antara lain menerima kunjungan Duta Besar untuk Indonesia dari negara Rumania, Argentina, Ceko, Aljazair, Rwanda, Iran,

Turki, Kolombia, Rusia, serta Bahrain. Selain itu, kunjungan delegasi Indonesia juga dilakukan ke negara-negara seperti Rumania dan Argentina.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Atas nama Pimpinan DPR RI, kami menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh Anggota DPR RI yang telah bekerja untuk mewujudkan harapan rakyat.

Rakyat menaruh harapan yang besar atas kerja-kerja konstitusional DPR RI.

Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia.

Atas nama Pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni 2025, DPR RI memasuki

Masa Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.

Selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Om shanti shanti shanti om.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

LAMPIRAN:

➤ Rancangan Undang Undang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I:

1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (*carry over*);
2. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (*carry over*);
3. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (*carry over*);
4. RUU tentang Hukum Acara Perdata (*carry over*);
5. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (*carry over*);
6. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara (*carry over*);
7. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (*carry over*/RUU Kumulatif Terbuka); dan

8. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary*).

➤ **Kegiatan Diplomasi Parlemen:**

1. Sidang the fourth (4th) Coordinating Committee of WAIPA di Kuching, Sarawak (21 April 2025);
2. Sidang the second (2nd) Consultative Meeting of Young Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (YPA) 2025 di Klang, Selangor (4-8 Mei 2025);
3. Kunjungan kerja sama bilateral antarparlemen ke Kroasia (18-24 Mei 2025);
4. Kunjungan kerja sama bilateral antarparlemen ke Yunani (25-31 Mei 2025);

5. Sidang the fourteenth (14th) ASEAN-AIPA Leaders Interface during the 46th ASEAN Summit and Related Meetings di Kuala Lumpur, Malaysia (23-27 Mei 2025).